

Judul : Hilirisasi mineral tetap lanjutkan
Tanggal : Kamis, 25 Mei 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Eropa Masih Gugat Hilirisasi Mineral Tetap Lanjutkan

ANGGOTA Komisi VII DPR Mukhtarudin meminta pemerintah melanjutkan program hilirisasi industri mineral di tanah air. Program ini disengketakan Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/ WTO). Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan pertama.

"Kita tidak boleh takut menghadapi gugatan di WTO. Walaupun kita kalah dalam gugatan pertama. Kita kan sedang berupaya banding. Nah, banding ini kan sedang proses," ungkap Mukhtarudin kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini berharap ketegasan dan keberanian Presiden Jokowi yang selalu serukan lawan gugatan Eropa di WTO. Hal tersebut mestinya juga diteruskan oleh Presiden selanjutnya, siapa pun Presiden hasil pemilu 2024 mendatang.

Mukhtarudin bilang, hilirisasi mineral adalah amanat Undang-Undang (UU) Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang jadi mutlak harus diperjuangkan, baik oleh pemerintah maupun legislatif. "Saya kira dengan melakukan hilirisasi di dalam negeri terhadap mineral nikel, maka dipastikan akan memberikan nilai tambah yang besar dan berkontribusi besar bagi perekonomian nasional," tambahnya.

Menurutnya, saling mengugat menjadi hal yang wajar. Seperti sebelumnya, Indonesia juga sempat melakukan gugatan yang disampaikan kepada WTO terhadap Uni Eropa terkait diskriminasi

sawit beberapa waktu lalu. Ia berharap agar pemerintah tetap melanjutkan program hilirisasi di sektor pertambangan tanah air, walaupun di tengah ancaman Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Intinya kita tentunya tidak boleh menyerah. Strategi hilirisasi pertambangan yang diantarnya dengan pembangunan banyak smelter untuk ragam jenis bahan tambang di dalam negeri harus tetap dilanjutkan, dibarengi dengan kelincuhan diplomasi perdagangan Internasional Indonesia di sisi lainnya," tegasnya.

Sementara, Komisi VIII DPR setuju dengan kebijakan Presiden Jokowi untuk menghentikan ekspor mineral mentah yakni bauksit setelah 10 Juni 2023 mendatang. Hal ini tertuang dalam kesimpulan Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII, Rabu (24/5).

Wakil Ketua Komisi VII DPR Dony Maryadi Oekon mengatakan, salah satu alasan DPR mendukung larangan ekspor bauksit setelah 10 Juni 2023 karena dalam rangka mempercepat hilirisasi mineral di Indonesia.

"Komisi VII DPR menyetujui penggunaan pasal 170 A Undang-Undang Minerba No.3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagai dasar untuk menyelesaikan polemik pelarangan ekspor dalam rangka mendorong percepatan hilirisasi mineral di Indonesia," tutur Doni. ■ KAL